



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Thamrin Nomor 93, Sail, Pekanbaru, Riau 28132,
Laman kesbangpol.riau.go.id, Pos-el kesbangpol@riau.go.id

Pekanbaru, 31 Juli 2025

Nomor : B/ 1147 /000.8.6.3/BKBP/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Rencana Aksi Capaian Kinerja TW I s/d II
Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau

Yth. Bapak Gubernur Riau

di -

Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka implementasi SAKIP tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan tahapan dan komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun salah satu wujud dari komponen pengukuran dan pelaporan kinerja adalah melalui laporan monitoring kinerja secara berkala (setiap triwulan) untuk mengetahui kemajuan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau perjanjian kinerja.

Berikut disampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana aksi capaian kinerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi capaian kinerja TW I s/d TW II Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana program/kegiatan/subkegiatan telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi capaian kinerja TW I s/d II Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yaitu :

- a. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau serta transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2. Informasi Umum

a. Indikator Kinerja Utama

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berdaya saing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945; merupakan dasar dan acuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terencana, terarah dan terkoordinasi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan pada hakekatnya merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Tujuan :
 - 1.1. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dengan Indikator Indeks Kerukunan Umat Bergama
 - 1.2. Meningkatkan Pemahaman Kehidupan Berdemokrasi dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia
2. Sasaran :
 - 2.1. Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama Antar Umat Beragama dengan Indikator Indeks Toleransi Antar Umat Bergama dan Indeks Kerjasama Antar Umat Beragama
 - 2.2. Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat dengan Indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- 2.3. Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Pancasila di daerah dengan Indikator Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
- 2.4. Meningkatnya Penerapan Demokrasi dengan Indikator Persentase Pemberdayaan Ormas
- 2.5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Indikator Nilai Sakip.

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal Januari 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET
1	Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi Antar Umat Bergama Indeks Kerjasama Antar Umat Beragama	76,15 84,38
2	Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	76,50
3	Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	3,20
4	Meningkatnya Penerapan Demokrasi	Persentase Pemberdayaan Ormas	100
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	70,05

c. Pohon Kinerja

Pohon Kinerja merupakan bentuk pelaksanaan dan langkah-langkah/metode yang digunakan sebagai acuan/dasar bagi perangkat daerah khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam menetapkan Kinerja Utama dan ukurannya serta menjabarkannya ke setiap level jabatan dan komponen perencanaan. Dengan demikian, ukuran kinerja setiap level jabatan menjadi lebih relevan dengan kinerja utama instansi pemerintah, sehingga pemerintah yang berorientasi hasil dapat direalisasikan secara nyata dan tidak menjadi slogan semata.

POHON KINERJA



POHON KINERJA



d. Cascading

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan target, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara vertikal. Proses ini dilakukan dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah.

Cascading merupakan strategi untuk mencapai hasil kerja yang baik. Proses ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap level organisasi bergerak sejalan dengan visi dan misi yang lebih luas. Berikut disampaikan Penjabaran (Cascading) kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2024 dibawah ini :



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target TW I/II/III/IV	Realisasi TW		Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I/II	Realisasi TW		Realisasi Capaian	Capaian (%)
				I	II					I	II		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Persen	100		100	100,00
							Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7		7	100,00
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7		7	100,00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	1		1	100,00
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	70		70	100,00
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	2		2	100,00
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	1	1	50,00

SKPD						
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	2	2	4	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis	2		2	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	1	1	50,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	1	1	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	9 Jenis	9		9	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	0	1	1	100,00

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	24	24	48	50,00
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	2	3	5	50,00
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Jenis	6	6	6	100,00
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0	3	3	50,00
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	2	2	100,00
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	2	2	100,00

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	1	1	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	5	5	10	50,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	1	1	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	4	4	4	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	125	125	250	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	0	1	1	50,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0	7	7	50,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0	3	3	50,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0	2	2	50,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	0	1	1	50,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	1	1	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	0	1	1	50,00

							Prasarana Pendukung Gedung	Pendukung Gedung Kantor atau						
							Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas						
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya Implementasi nilai - nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	3,20	0,00	0,00	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	3,20 Nilai	3,20	3,20	3,20	96,53		
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	100	100	100	100,00		
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	0	1	1	100,00		
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	0	1	1	100,00		

							<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>250 Orang</p>	<p>50</p>	<p>100</p>	<p>150</p>	<p>50,00</p>
							<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>80 Orang</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>40</p>	<p>50,00</p>
							<p>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100,00</p>
							<p>Pembentukan dan Penumbuhan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100,00</p>

							Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya Purnapaskibraka Duta Pancasila	36 Orang	0	36	36	100,00
							Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	0	1	1	100,00
							Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Terlaksananya Penugasan Paskibraka	1 Dokumen	0	1	1	100,00
							Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0	1	1	100,00

							Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0	1	1	100,00
							Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	36 Orang	0	36	36	100,00
	Meningkatnya Penerapan Demokrasi	Persentase Pemberdayaan Ormas	100,00	0,00	0,00	0	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,20 Nilai		3,20	3,20	100,00
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen		100	100	100,00

						Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0,00
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0,00
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	100	100	200	50,00

							<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	300 Orang	50	100	150	50,00
							<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	1 Laporan	0	0	0	0,00
	Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama Indeks Kerjasama Antar Umat Beragama	76,15 84,38	0,00	0,00	0,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Berfungsi sesuai Regulasi	75,50 Persen	75,50		75,50	100,00
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	100		100	100,00

						Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	1	1	100,00
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	1	1	100,00
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	25	25	50	50,00
						Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	0	25	25	50,00
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	0	1	1	100,00

Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi Umat Beragama	76,15	0,00	0,00	0,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	3,15 Nilai	3,15	3,15	100,00	
	Indeks Kerjasama Umat Beragama	84,38	0,00	0,00	0,00		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,00 Nilai	3,00	3,00	100,00	
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	100,00	100	100,00	
							Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	0	1	1	100,00
							Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	0	1	1	100,00
							Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	25	25	50	50,00

								Penghayat Kepercayaan di Daerah						
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	15	15	30	50,00
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	0	1	1	100,00
	Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	76,50	0,00	0,00	0,00		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	66,67 Persen	66,67		66,67	100,00
								Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	100,00		100	100,00

						Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	1	1	100,00
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	1	1	100,00
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	50	100	150	50,00

							<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	200 Orang	50	50	100	50,00
							<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	2 Laporan	0	1	1	50,00
							<p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</p>	1 Dokumen	0	1	1	100,00

b. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Riau TW I s.d TW II Tahun 2025 yaitu :

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.436.984.871,00	7.740.219.341,00	57,60
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.617.000,00	11.656.000,00	6,68
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.617.000,00	11.656.000,00	6,68
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.711.618.691,00	6.822.360.832,00	63,69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.711.618.691,00	6.822.360.832,00	63,69
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.879.184,00	27.513.300,00	49,45
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	37.239.041,00	0,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.640.143,00	27.513.300,00	49,45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.052.088,00	0,00	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.052.088,00	0,00	0,00
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	701.169.984,00	294.943.972,00	42,06
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.989.236,00	0,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.800.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.344.796,00	192.000,00	0,86
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.663.485,00	40.954.314,00	35,72
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.684.727,00	4.104.780,00	12,19
	Penyediaan Bahan/ Material	9.999.388,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.600.000,00	5.640.000,00	11,85
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.092.000,00	244.052.878,00	77,21
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49.996.352,00	0,00	0,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.978.646,00	9.694.320,00	16,72
	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.996.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	19.982.646,00	9.694.320,00	48,51
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.388.929.278,00	519.550.917,00	37,41
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.998.000,00	2.236.000,00	22,36
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.998.552,00	89.669.097,00	24,91
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.855.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	983.077.726,00	427.645.820,00	43,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.740.000,00	54.500.000,00	18,75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	176.800.000,00	28.100.000,00	15,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.960.000,00	26.400.000,00	30,71
	Pemeliharaan Mebel	8.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.980.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.086.863.961,00	557.838.713,00	18,07
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.086.863.961,00	557.838.713,00	18,07

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.910.000,00	0,00	0,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.665.000,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	569.745.519,00	250.000.000,00	43,88
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	34.647.751,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70.554.505,00	36.882.250,00	52,27
	Pembentukan dan Penumbuhan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	51.059.329,00	0,00	0,00
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	17.260.000,00	0,00	0,00
	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibraka dan Purnapaskibraka	1.748.000,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	400.138.670,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	9.575.000,00	0,00	0,00
	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	9.879.000,00	0,00	0,00
	Pembentukan Paskibraka	1.915.681.187,00	270.956.463,00	14,14
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.618.365.204,00	14.857.701.250,00	89,41
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16.618.365.204,00	14.857.701.250,00	89,41

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.715.832,00	0,00	0,00
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9.703.070,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.433.834.504,00	14.808.390.000,00	90,11
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	69.354.690,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	93.757.108,00	49.311.250,00	52,59
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	281.078.477,00	33.118.316,00	11,78
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	281.078.477,00	33.118.316,00	11,78
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.870.820,00	0,00	0,00
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.768.687,00	0,00	0,00

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	43.640.470,00	10.127.316,00	23,21
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	186.161.730,00	4.900.000,00	2,63
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	43.636.770,00	18.091.000,00	41,46
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.552.255.656,00	512.663.000,00	33,03
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.552.255.656,00	512.663.000,00	33,03
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.517.629,00	0,00	0,00
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.538.865,50	4.221.000,00	55,99
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.448.468.287,00	508.442.000,00	35,10
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	37.518.128,50	0,00	0,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	43.212.746,00	0,00	0,00
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.181.879.005,00	198.510.508,00	9,10

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.181.879.005,00	198.510.508,00	9,10
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.227.046,00	0,00	0,00
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.605.690,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	435.617.587,00	152.503.640,00	35,01
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	260.437.090,00	46.006.868,00	17,67
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	141.831.692,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.340.159.900,00	0,00	0,00
	JUMLAH	37.157.427.174,00	23.900.051.128,00	64,32

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Faktor-faktor pendukung percepatan pencapaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengupayakan lebih lagi terhadap keberadaan forum-forum terkait kondusifitas dan pembauran (FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, FPK, dan FKUB);

2. Dukungan penuh dari Pemerintah dan jajaran samping terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Adapun permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian target pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, diantaranya sebagai berikut :

1. Akses terhadap informasi yang cepat dan tanpa batas (tanpa ada saringan ideologi)
2. Intoleransi terhadap paham tertentu melunturkan semangat kebhinekaan
3. Isu terorisme dan radikalisme memasih kuat mewarnai kehidupan masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan

d. Upaya Strategis Percepatan Pencapaian Target Kinerja

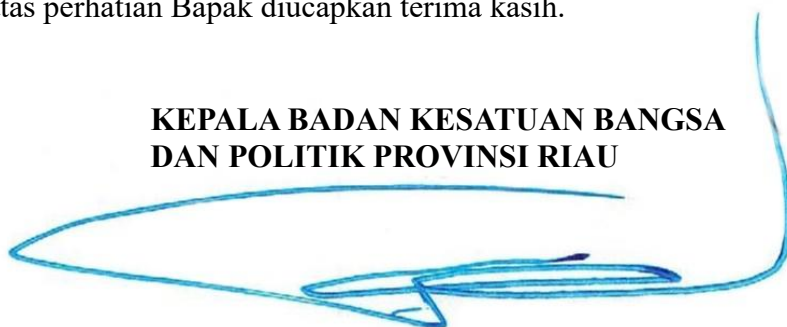
Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam mencapai target kinerja di triwulan, sebagai berikut :

1. Monitoring kegiatan organisasi/lembaga asing di daerah.
2. Pemberdayaan elemen masyarakat mitra pemda dan organisasi kemasyarakatan dalam memelihara keutuhan NKRI, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri serta deteksi dini, cegah dini potensi konflik sosial dan keagamaan di daerah.
3. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan massa media, serta lembaga dan organisasi terkait.
4. Memberi dukungan dalam upaya menumbuh kembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
5. Melakukan identifikasi kendala/permasalahan dan mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut
6. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama.
7. Meningkatkan peran lembaga, instansi, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta elemen/lembaga masyarakat mitra pemerintah daerah dalam penanganan Narkoba dan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat potensi konflik dan penanganan konflik sosial di Provinsi Riau.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja TW I s/d TW II Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai serta sebagai alat ukur untuk keberhasilan dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI RIAU**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JENRI SALMON GINTING', is written over the official title. The signature is fluid and somewhat stylized, with a long horizontal stroke that loops back.

JENRI SALMON GINTING, AP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 197501011994021002